

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

IV.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kota Bogor tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu kota besar Indonesia, Kota Bogor tumbuh dengan berbagai kemajuan yang masih diiringi permasalahan perkotaan yang juga kerap muncul. Seringkali secara umum seperti terjadi juga di kota besar lainnya, fenomena pertumbuhan penduduk, pergeseran sektor unggulan, meningkatnya aktivitas perkotaan yang mulai mereduksi kelestarian lingkungan, perubahan budaya perkotaan yang belum diimbangi dengan potensi kota dan kesiapan masyarakat, dan hal lainnya, terjadi pula di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara, dan FGD (*Focus Group Discussion*), beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kota Bogor dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

A. BIDANG PENDIDIKAN

Belum Terpenuhinya Wajib Belajar 9 Tahun

Pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan di Kota Bogor dapat dikatakan kurang merata terbukti dari program wajib belajar 9 tahun yang masih belum diperoleh semua anak usia sekolah yang ada di seluruh Kecamatan Kota Bogor. Pada tahun 2013 program wajib belajar 9 tahun di Kota Bogor tidak terpenuhi dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Begitu pula dengan angka APK menurun pada tingkat SD dan SMP. Di sisi lain, lulusan S1, S2 dan S3 jumlahnya mencapai 14 persen dari jumlah penduduk.

B. BIDANG KESEHATAN

Belum Terpenuhinya Layanan Kesehatan Masyarakat secara Optimal

Sarana prasarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas, dan dokter memiliki rasio yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kondisi angka balita gizi buruk masih dinilai cukup tinggi yaitu mencapai angka 378 kasus pada tahun 2013, yang mana hal ini dapat disebabkan rasio posyandu per satuan balita masih rendah. Angka balita gizi buruk paling banyak berasal dari Kecamatan Bogor Utara yakni sebanyak 94 kasus, dan angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 0,47 persen. Rasio puskesmas per satuan penduduk idealnya adalah 1: 30.000, sedangkan di lapangan mencapai 1: 42.663. Masih kurangnya jumlah dokter ditunjukkan pada nilai rasio dokter per satuan penduduk yang juga sudah melebihi kapasitas pelayanannya yaitu 1: 4.511 penduduk, sedangkan kapasitas standar pelayanan yang seharusnya yaitu 1: 2500 penduduk. Permasalahan lain terkait kesehatan yang dihadapi Kota Bogor adalah masih terdapat beberapa penyakit dengan jumlah kasus yang tinggi atau terus meningkat diantaranya TBC, tifus, dan hepatitis. Ditambah kondisi perkembangan kasus HIV/AIDS, dimana dari sisi jumlah

kasus maupun dari segi peningkatannya cukup mencemaskan dan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2010, Kota Bogor merupakan 10 besar kota dengan jumlah penderita TBC terbanyak untuk wilayah Jawa Barat. Sebanyak 1.023 dari 7.641 orang suspek di Kota Bogor, dideteksi positif menderita penyakit TBC. Hasil pendataan 10.166 orang suspect TBC dan 1.021 positif TBC, menunjukkan hasil bahwa penyakit TBC saat ini sering kali menyerang usia produktif yakni dari usia 14 hingga 54 tahun. Hasil evaluasi Program TB Paru 2011, Dinas Kesehatan mencatat sudah ada 507 orang positif dari 3.850 suspek yang berhasil didata petugas.

Untuk kasus hepatitis, Kota Bogor pernah mengalami peningkatan kasus Hepatitis A pada bulan September 2011 sebanyak 11 orang di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat. Kemudian kasus kumulatif HIV/AIDS Kota Bogor yang dicatat oleh AIDS Watch Indonesia pada tahun 2013, menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sampai Desember 2012 sudah mencapai 1.693 kasus. Kemudian diketahui dari 2015 penderita, 976 diantaranya positif mengidap AIDS. Setidaknya terdapat 1388 orang penderita yang masih masuk ke dalam usia produktif, yaitu 25 sampai 49 tahun. Terdapat 1418 penderita diantaranya adalah laki-laki, dan sudah ada 79 penderita AIDS yang meninggal dunia sejak tahun 2001.

C. BIDANGLINGKUNGAN HIDUP

1. Tingginya Tingkat Pencemaran Lingkungan

Isu pencemaran lingkungan di Kota Bogor yang dihadapi menjadi permasalahan pembangunan daerah, khususnya dalam hal menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya. Isu-isu lain terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Bogor adalah sanitasi yang buruk, pengelolaan dua sungai besar (Ciliwung dan Cisadane) yang melintasi Kota Bogor belum cukup baik, serta polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor.

Pada tahun 2011 masih banyak rumah yang menggunakan sanitasi dengan *plengsengan* yaitu buangan kakus langsung dibuang ke sungai tanpa masuk ke tangki septik (15,58% KK). Kecenderungan tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pengelolaan sungai besar yang melintasi Kota Bogor pun dinilai belum optimal, yang mana kualitas air Sungai Ciliwung di Kota Bogor telah melampaui ambang baku mutu air yang ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 baik dari parameter fisik, kimia dan biologi. Nilai rata-rata BOD hasil penelitian sebesar 9,975, nilai rata-rata DO sebesar 6,479 dan jumlah rata-rata total coliform sebesar 57.000 koloni/ml – 408.000 koloni/ml. Meningkatnya aktivitas manusia, perubahan guna lahan dan semakin beragamnya pola hidup menjadikan tingkat pencemaran di Sungai Ciliwung semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Permasalahan polusi udara karena kendaraan bermotor ditunjukkan dari pengukuran parameter TSP (debu) di beberapa tempat di Kota Bogor pada tahun sampai dengan tahun 2012 umumnya sudah melewati baku mutu 230 µg/Nm³.

2. Pengelolaan Sampah yang Belum Terpadu

Permasalahan lain yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya bagi kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama karena (i) besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, (ii) keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir, dan (iii) teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang dihasilkan Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri. Permasalahan sampah dan pengelolaan sampah di Kota Bogor di antaranya adalah masih terdapat 29,80% dari total seluruh rumah tangga masih membuang sampah dengan cara cara menimbun, membakar, membuang ke sungai dan lainnya. Pada tahun 2013 baru terdapat 13 kelurahan dengan total penduduk sebesar 39.540 jiwa yang terlayani program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

D. BIDANGPENATAAN RUANG

1. Pengembangan Kawasan Belum Memperhatikan Kawasan Rawan Bencana

Pengembangan kawasan belum memperhatikan kawasan rawan bencana merupakan permasalahan yang terjadi di Kota Bogor pada bidang penataan ruang. Kondisi kontur tanah yang labil menyebabkan ancaman terhadap bencana alam, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Bogor. Selain longsor, potensi bencana lain yaitu berupa banjir, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran (akibat petir dan arus pendek). Berdasarkan hasil pemetaan daerah potensi bencana di Kota Bogor, dari enam kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor, hampir separuh wilayahnya adalah rawan banjir dan longsor.

Kecamatan Bogor Barat sebagai Wilayah Pelayanan (WP) B dengan potensi pengembangan wilayah sebagai pusat pengembangan di kawasan Bubulak merupakan kawasan paling rawan bencana longsor. Terdapat 32 titik rawan bencana alam yang terdiri atas daerah rawan longsor dan banjir yang tersebar di enam wilayah kecamatan se-Kota Bogor. Untuk wilayah Kecamatan Bogor Tengah terdapat tiga titik rawan longsor, di Kecamatan Tanah Sereal terdapat enam titik rawan banjir, Kecamatan Bogor Barat terdapat enam titik rawan longsor dan banjir, Kecamatan Bogor Selatan terdapat 12 titik rawan longsor, Kecamatan Bogor Timur terdapat tiga titik rawan banjir dan di wilayah Kecamatan Bogor Utara terdapat dua titik rawan banjir. Pada tahun 2013 tercatat lebih dari 40 peristiwa tanah longsor terjadi di berbagai lokasi di Kota Bogor, dalam skala kecil hingga besar. Dampak lain yang perlu diantisipasi adalah peningkatan suhu 10°C akibat perubahan iklim mikro di Kota Bogor pada sepuluh tahun belakangan yang dapat memicu kondisi kekeringan dan banjir.

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Belum Optimal

Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal baik dari sisi pemanfaatan, pengawasan, dan pengendaliannya. Permasalahan yang dihadapi terkait penataan ruang diantaranya adalah daya dukung lahan dan daya dukung air Kota Bogor sudah terlampaui (*overshoot*). Selain itu tingkat konversi lahan pertanian/Ruang Terbuka Hijau dinilai cukup tinggi. Luas lahan pertanian di Kota Bogor semakin berkurang akibat dikonversi ke penggunaan non pertanian. Sebagian besar kasus konversi lahan pertanian terutama pada lahan sawah yang masih produktif. Konversi lahan pertanian tersebut sebagian besar diantaranya menjadi perumahan dan kawasan perdagangan yang ditandai dengan ruko-ruko.

Rencana tata ruang Kota Bogor menetapkan bahwa kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya merupakan wilayah pusat kota sebagai kota lama (kawasan bersejarah). Hanya saja, arahan pemanfaatannya adalah untuk mempertahankan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota. Penetapan ini dapat menjadi tekanan terhadap keberadaan Kebun Raya Bogor. Kemudian terdapat sedikitnya 117

Base Transceiver Station (BTS) yang berdiri di Kota Bogor tidak memiliki izin. Umumnya pengelola tower hanya mengantongi Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT). Namun ada juga pengelola tower yang tidak memiliki secarik izin pun.

Total luas inkonsistensi tata ruang yang terjadi di Kota Bogor sebesar 127,21 hektar atau 1,13 persen dari total luas wilayah Kota Bogor. Inkonsistensi terbesar terjadi pada taman/lapangan olah raga/jalur hijau menjadi ruang terbangun yaitu 94,31 hektar (0,84% dari total luas wilayah Kota Bogor), pertanian/kebun campuran menjadi ruang terbangun sebesar 22,57 hektar (0,20% dari total luas wilayah Kota Bogor) dan hutan kota menjadi ruang terbangun sebesar 10,33 hektar (0,09% dari total luas wilayah Kota Bogor). Hal lain yang cukup mendasar adalah belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

3. Memudarnya Identitas Kota Bogor

Sejarah yang panjang dengan identitas yang kuat sebagai kota yang nyaman, memiliki tata ruang dengan konsep *garden city*, yang melekat pada Kota Bogor dari masa kerajaan sampai masa kolonial semakin memudar. Kenyataannya, keberadaan dari bangunan dan peninggalan bersejarah belum menjadi hal yang penting. Bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bogor belum diperhatikan sebagai sebuah aset yang bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur, melindungi dan melestarikan bangunan bersejarah. Kondisi ini dikuatkan dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang beralih fungsi menjadi bangunan komersial seperti hotel dan restoran. Pembangunan Kota Bogor cenderung menata kota dari aspek fisik keruangannya saja dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nilai budaya, kesejarahan yang melekat dan mewarnai Kota Bogor sebagai identitas Kota Bogor kurang menjadi perhatian utama.

Kedepannya perkembangan Kota Bogor diharapkan tetap dapat mempertahankan identitas Kota Bogor, termasuk konsep *garden city*. Konsep *garden city* yang dimaksud bukan berarti hanya kota yang dipenuhi taman, tetapi menyangkut penataan ruang yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktifitas masyarakat kota, termasuk penataan *green network* (jaringan ruang terbuka hijau berupa taman-taman, jalur hijau, hutan kota/kawasan lindung, lahan pertanian) yang berkontribusi terhadap sistem ekologis kota, nilai ekonomi, sosial dan kenyamanan lingkungan.

E. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Belum Optimalnya Kerja Sama Antar Daerah

Permasalahan yang terdapat dalam bidang perencanaan pembangunan salah satunya adalah belum optimalnya kerja sama antar daerah. Hal ini dapat dilihat belum dapat dimanfaatkan dengan optimalnya aset kelembagaan yang terdapat di Kota Bogor, salah satunya sejumlah perguruan tinggi dan kantor pusat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO (*Non-Government Organization*) yang aktif dalam memperjuangkan isu-isu tertentu di berbagai wilayah di Indonesia. Banyaknya kajian mengenai Kota Bogor yang dilakukan oleh perguruan tinggi belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dalam upaya untuk mengembangkan kota atau upaya yang telah dilakukan para LSM di luar Kota Bogor pun belum dapat direplikasikan di Kota Bogor.

Selain aset kelembagaan-kelembagaan yang ada di Kota Bogor, sinergi pembangunan dengan kota/kabupaten lain pun masih belum optimal. Perlu kelembagaan khusus yang mengatur kerjasama antar daerah mengingat beberapa kawasan memiliki sumberdaya dan permasalahan yang sama yang harus diselesaikan secara bersama-sama, contoh: Daerah Aliran Sungai (DAS)

dengan melibatkan daerah yang dialiri DAS yang sama, pengelolaan kawasan khusus Jabodetabekjur yang melibatkan tiga provinsi, kerja sama antar daerah dalam hal penyepakatan batas wilayah, dan tentunya kerja sama dalam pengembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Isu terkait kerjasama antar daerah, sejalan juga dengan apa yang diamanatkan dalam RPJP Kota Bogor dalam RPJMD periode ketiga ini (2015-2019), yang mana harus mengoptimalkan kerjasama antar wilayah skala nasional/regional maupun luar negeri dalam rangka pengembangan ekonomi.

F. BIDANG PENANAMAN MODAL

Peningkatan Investasi yang Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah

Investasi merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan perekonomian di Kota Bogor. Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan nilai investasi Kota Bogor. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia kaitannya dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan pelayanan dan prosedur berinvestasi, stabilitas ketentraman dan ketertiban, infrastruktur pendukung, serta promosi investasi. Dalam rangka peningkatan aspek daya saing terhadap wilayah terhadap kabupaten/kota lain, maka peningkatan investasi perlu terus dilakukan sehingga tidak menjadi wilayah yang tertinggal dengan wilayah kabupaten/kota sekitar. Namun peningkatan investasi yang belum mengacu pada potensi dan daya saing wilayah masih menjadi permasalahan yang terjadi saat ini.

G. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

UMKM dan Industri Kreatif yang Belum Berkembang

Pengembangan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM), maupun industri kreatif masih menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah masih sulitnya akses permodalan bagi pelaku usaha, belum berkembangnya pusat-pusat industri kecil, UMKM dan industri kreatif, masih rendahnya insan kreatif yang memiliki jiwa kewirausahaan, dan masih rendahnya kapasitas sumberdaya pelaku usaha.

Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri memiliki tren yang meningkat berdasarkan kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 25,10% dan pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 27,51% terhadap total PDRB. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan.

Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor diantaranya adalah fesyen, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi untuk souvenir atau oleh-oleh.

Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor. Pengembangannya memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung.

H. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tingginya Jumlah Penduduk

Tingginya jumlah penduduk merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bogor khususnya pada bidang kependudukan dan catatan sipil. Jumlah penduduk di Kota Bogor semakin meningkat dengan perkembangan kepadatan penduduk yang semakin padat. Rasio kepadatan penduduk per km² mencapai 6.000 jiwa yang kemudian di tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Bogor mencapai 8.480 orang per km². Dalam dokumen RPJP Kota Bogor 2005-2025 dinyatakan bahwa Kota Bogor sebagai Kota penyangga ibukota diarahkan untuk dapat menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2025. Kontribusi pertumbuhan penduduk ini semakin nyata berhubungan dengan tingginya pula tingkat migrasi wilayah-wilayah yang menjadi satelit DKI Jakarta.

I. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Tingginya Angka Pengangguran

Angka pengangguran yang cukup tinggi, masih menjadi permasalahan Kota Bogor. Berdasarkan data dari Kota Bogor Dalam Angka, tingkat pengangguran Kota Bogor mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 sebesar 3,64% kemudian menjadi 9,33% pada tahun 2012. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan angka pengangguran Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,47%.

J. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Belum Tangguhnya Ketahanan Pangan Daerah

Isu ketahanan pangan merupakan isu global yang hampir terjadi di setiap daerah. Seperti wilayah perkotaan lainnya, Kota Bogor bukan merupakan daerah utama penghasil pertanian sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan, akan mengandalkan pasokan dari wilayah lain. Permasalahan utama pada aspek ketahanan pangan adalah terletak pada distribusi dan pengamanan harga. Masalah ini kemudian mempengaruhi masalah lainnya yaitu inflasi. Data menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir penyumbang terbesar bagi inflasi adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi.

K. BIDANG PERHUBUNGAN

Penataan Sistem Transportasi yang Belum Maksimal

Permasalahan utama terkait sistem transportasi di Kota Bogor adalah kemacetan yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah kendaraan. Pada tahun 2013 rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan di Kota Bogor 1:47, artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang satu kilometer dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda dua sebanyak 47 kendaraan. Nilai rasio tersebut meningkat dikarenakan jumlah pengguna angkutan umum tiga

tahun terakhir semakin menurun. Selain banyaknya jumlah kendaraan, kemacetan yang terjadi di beberapa titik diakibatkan oleh angkutan perkotaan (angkot) yang berhenti sembarangan untuk menurunkan dan menunggu penumpang.

Permasalahan lain terkait sistem transportasi di Kota Bogor diantaranya adalah tingginya angka pengguna *commuter linedi* Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi AKAP yang memadai (4.000 motor terparkir setiap harinya di sekitar Stasiun Bogor dan pengendaranya menuju Jakarta dan sekitarnya dengan *commuter line*).

Hal lain juga terkait sarana prasarana lalu lintas yang masih tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, *underpass* yang belum optimal penggunaannya (IPB menuju Kebun Raya Bogor) dan masih banyak jalan-jalan yang berlubang. Hal tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan angka kejadian kecelakaan lalu lintas.

L. BIDANG SOSIAL

Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Kelompok Masyarakat Marjinal Perkotaan

Permasalahan utama yang dihadapi Bidang Sosial di Kota Bogor yaitu tingginya tingkat kemiskinan dan kelompok masyarakat marginal perkotaan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tingginya jumlah penduduk miskin, banyaknya kasus penyandang masalah sosial, khususnya anak jalanan dan kecenderungan meningkatnya kawasan kumuh perkotaan. Jumlah penduduk miskin 88.900 jiwa (9,16%) meskipun tiap tahunnya terus menurun rata-rata 0,46 persen per tahunnya, namun memiliki peringkat keempat tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat. Dari total penduduk Kota Bogor, 3,19 persen memiliki kategori sangat miskin, 6,28 persen miskin dan 8,39 persen hampir miskin. Dari total jumlah penduduk miskin, 29,45 persen tidak tamat SD, 55,18 persen tamat SD/SMP, dan 15,37 persen tamat SMA keatas.

Jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Bogor meningkat pada saat menjelang lebaran. Diperkirakan ada lebih dari 1000 anak jalanan yang beroperasi di perempatan, pertigaan, angkutan kota, pasar dan terminal. Belum adanya aturan yang tegas dan efektif oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam menangani permasalahan ini. Selain itu terdapat 801 anak terlantar, 189 balita terlantar, 470 lanjut usia terlantar, 7 anak nakal, 114 korban penyalahgunaan narkoba dan 1.632 penyandang cacat.

Kemudian masih terdapat 191,82 hektar kawasan kumuh (SPM PU dan Tata Ruang: Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan, target RPJMD 2010-2014). Masih ada sebanyak 753 KK (0,31%) yang menggunakan air sungai sebagai MCK dan masih terdapat sebanyak 3.415 KK (1,38%) tidak memiliki tempat pembuangan akhir (WC).

M. BIDANG KEBUDAYAAN

Menurunnya Nilai dan Budaya Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi terkait budaya dan nilai hidup di Kota Bogor diantaranya adalah terkait dengan aktifitas ekonomi perkotaan yang memenuhi kebutuhan ibu kota. Masyarakat Kota Bogor sebagian besar merupakan masyarakat *commuter* yang bekerja di luar Kota Bogor, yang menghabiskan waktunya di Kota Bogor ketika malam dan akhir pekan, sehingga sebagian besar kurang memperdulikan nasib kotanya. Bentuk ketidakpedulian lain masyarakat terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan, tidak mengelola sampah (baik di pasar, pertokoan

maupun tingkat rumah tangga), dan masih terdapat warga yang membuang sampah di sungai.

Sebagai kota satelit ibukota, kalangan muda di Kota Bogor banyak mengadopsi gaya hidup negatif kota metropolitan. Kegagalan di kalangan anak muda ini terkait dengan belum ditemukannya jati diri. Tekanan dan tuntutan gaya hidup mendorong kalangan muda melakukan berbagai hal, baik yang positif maupun hal negatif dalam rangka memenuhi gaya hidup ideal yang diinginkan. Kurangnya transfer nilai dan norma-norma di kalangan muda juga menandai salah satu faktor yang mendorong dekadensi moral pada generasi muda. Tuntutan orang tua yang bekerja dan sedikit meluangkan waktu untuk anak menjadi alasan lain isu ini muncul.

N. BIDANG PARIWISATA

Menurunnya Kontribusi Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel, dan Restoran)

Layaknya kota jasa pada umumnya, sektor yang berkembang adalah sektor tersier. Pada Kota Bogor, sektor tersier yang berkembang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Kota Bogor. Meskipun secara total keseluruhan PDRB Kota Bogor terus mengalami peningkatan, namun permasalahan yang dihadapi adalah kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan justru terlihat pada sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan. Sektor ini merupakan sektor yang kontribusi terhadap total PDRB terbesar kedua setelah sektor perdagangan hotel dan restoran, yaitu sebesar 27,51% pada tahun 2012 dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

O. BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1. Peningkatan Laju Inflasi

Permasalahan lain yang terjadi yaitu peningkatan laju inflasi di Kota Bogor. Laju inflasi Kota Bogor pada tahun 2013 berada pada angka 8,55 persen, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,06 persen. Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bogor hanya sebesar 0,41 persen. Selama empat tahun terakhir penyumbang terbesar bagi inflasi adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi.

2. Belum Maksimalnya Revitalisasi Pasar Tradisional

Kondisi pasar tradisional di Kota Bogor secara umum hingga saat ini masih memprihatinkan, pasar tradisional terkesan semrawut dan kumuh. Hal tersebut dicirikan dengan sampah yang berserakan, becek, bau menyengat dan sistem keamanan yang minim. Permasalahan lain yang dihadapi pasar tradisional adalah buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim. Belum terintegrasinya sistem transportasi dengan pasar-pasar tradisional, sehingga aktivitas pasar tradisional menambah titik kemacetan.

Disisi lain pertumbuhan *mall* dan *mini market* yang belakangan ini marak harus dikendalikan agar dapat menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha, khususnya antara pedagang modern dan pedagang tradisional, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Revitalisasi pasar tradisional menjadi penting dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kualitas pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern serta menjadi sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor.

IV.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan kedepan.

Berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan Kota Bogor yang dikemukakan di atas, isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah kemudian dikelompokkan kedalam tiga bidang yang meliputi bidang fisik-lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi.

A. PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM MIKRO KOTA BOGOR

Pencemaran yang banyak terjadi di Kota Bogor adalah yang terkait dengan air (baik air tanah, air permukaan, air sungai, maupun situ) dan udara (polusi udara karena emisi buangan kendaraan bermotor dan debu). Pencemaran air (baik air tanah maupun badan air seperti air sungai) banyak terjadi dikarenakan pengelolaan air limbah, baik limbah cair maupun limbah padat yang belum memadai. Masih terdapat jumlah orang yang buang air besar di sungai ataupun drainase, usaha komersial membuang air hasil kegiatannya tanpa diolah terlebih dahulu ke badan air.

Berdasarkan data hasil analisis kualitas air sungai Ciliwung tahun 2010, dapat diketahui bahwa kualitas air di lokasi bagian hulu, tengah dan hilir Sungai Ciliwung kurang memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan air kelas dua pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 karena tingginya total bakteri colie dengan jumlah yang melampaui persyaratan kriteria baku mutu tersebut, baik di bagian hulu, tengah, maupun hilir. Di bagian hilir Sungai Ciliwung selain BOD dan jumlah bakteri total koliform yang tinggi, juga mengandung fosfat total dan amonia total yang melampaui persyaratan.

Hal ini diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang masing sering membuang sampah langsung ke sungai. Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi Kota Bogor. Pengelolaan sampah belum optimal, timbulan sampah kota yang cukup besar, serta sarana prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai.

Pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA merupakan bentuk pengisian kembali (*recharge*), baik secara infiltrasi maupun perlokasi, merupakan penyebab pencemaran air tanah yang sangat besar terutama air tanah dangkal maupun air sumur gali, sehingga perlu penanganan serius.

Pencemaran lingkungan karena polusi udara juga sudah dirasakan akibat semakin meningkatnya pemakaian sarana transportasi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Tingkat polusi udara di Kota Bogor menempati urutan ketiga di Jawa Barat.

Pencemaran tersebut mengakibatkan menurunnya kenyamanan kota. Salah satu indikator kenyamanan kota adalah kondisi iklim mikro kota itu sendiri. Kota Bogor terkenal sebagai kota hujan yang menjadi tujuan wisata karena berhawa sejuk dan nyaman. Namun, perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu juga mulai terjadi di Kota Bogor. Iklim mikro berpengaruh kuat terhadap kenyamanan termal manusia. Elemen pembentuk iklim mikro yang mempengaruhi kenyamanan kota adalah radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban relatif, dan pergerakan udara (angin). Perubahan iklim mikro ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penduduk kota. Berdasarkan penelitian, wilayah Bogor pada siang hari memiliki suhu permukaan rata-rata sebesar 26,8°C, sedangkan malam hari sebesar 19,4°C. Pada siang hari, suhu permukaan membentuk pola UHI (*Urban Heat Island*) yang memusat di Kota

Bogor dan menyebabkan hawa panas. Salah satu penyebabnya adalah mulai berkurangnya ruang terbuka hijau. Implikasi dari berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan adalah peningkatan temperatur yang berpotensi menimbulkan fenomena tersebut.

B. KETIDAKSESUAIAN ANTARA PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infratrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kota kabupaten/kota tersebut.

Pembangunan seringkali diiringi dengan inkonsistensi terhadap aturan tata ruang yang telah dibuat. Inkonsistensi yang terjadi menyebabkan kesemrawutan ruang dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Bila hal ini tidak dikendalikan secara terpadu maka dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumberdaya alam dan mengganggu keberlanjutan kota.

Kota Bogor memiliki luas 11248,85 Ha, dan menunjukkan gejala inkonsistensi tata ruang. Total luas inkonsistensi tata ruang yang terjadi di Kota Bogor sebesar 127,21 Ha atau 1,13% dari total luas wilayah Kota Bogor. Inkonsistensi terbesar terjadi pada taman/lapangan olah raga/jalur hijau menjadi ruang terbangun yaitu 94,31 Ha (0,84% dari total luas wilayah Kota Bogor), pertanian/kebun campuran menjadi ruang terbangun sebesar 22,57 Ha (0,20% dari total luas wilayah Kota Bogor) dan hutan kota menjadi ruang terbangun sebesar 10,33 Ha (0,09% dari total luas wilayah Kota Bogor).

Dari data ini terlihat bahwa inkonsistensi terjadi pada ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi ruang terbangun. Kebutuhan akan ruang untuk permukiman menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Berdasarkan data penggunaan lahan, pada tahun 2007 luas lahan permukiman di Kota Bogor adalah seluas 4.161,4 Ha atau 35,12% dari total luas wilayah, dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami perluasan sekitar 9,98% menjadi seluas 4.577 Ha atau 38,62% dari total luas wilayah Kota Bogor seluas 11.850 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ruang bagi permukiman di Kota Bogor menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan semakin berkembangnya lahan permukiman dan tuntutan kebutuhan ruang bagi permukiman kedepannya, memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan perkembangan Kota Bogor kedepannya apabila tidak direncanakan strategi penanganannya sejak dini.

Inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW di Kota Bogor sebagian besar diakibatkan adanya perubahan tutupan lahan pada kawasan konservasi di kelerengan 2-15% menjadi TPLK (kebun campuran/tegal), yang kemudian perlahan-lahan berubah menjadi permukiman. Konsentrasi perubahan tutupan lahan menjadi ruang terbangun adalah di kecamatan Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Timur. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi prioritas pengembangan permukiman guna mengimbangi perkembangan perkotaan pada kecamatan lainnya seperti Tanah Sareal dan Bogor Utara. Sedangkan pusat perubahan lahan menjadi kebun campuran/tegal berada di kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan. Kecamatan Bogor Tengah selain untuk pengembangan perkotaan juga merupakan daerah konservasi karena adanya KRB. Kecamatan Bogor Selatan lebih diprioritaskan untuk pengembangan agrowisata dan industri pertanian. Perlu adanya aturan yang tegas untuk menindak upaya pengalihan fungsi lahan yang semakin jauh menyimpang dari fungsi semula.

Berdasarkan Perbandingan Ketersediaan Lahan (SL) terhadap kebutuhan lahan (DL), dan Perbandingan Ketersediaan Air (SW) terhadap Kebutuhan Air (DW), diketahui bahwa Daya Dukung Lahan dan Air Kota Bogor sudah terlampaui (*overshoot*). Hal ini sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan di perkotaan cenderung ke arah penutupan tanah dengan bahan-bahan semen yang tidak tembus air, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan hidrologi. Hidrologi kota menjadi masalah pelik karena urbanisasi meningkatkan luasan permukaan tertutup semen, paving, aspal, sehingga air hujan tercegah masuk ke dalam tanah dan menjadi limpasan permukaan yang berakhir pada krisis ketersediaan air tanah.

Meskipun pemakaian air tanah pada tahun 2011 secara keseluruhan hanya sekitar 37,75% dari potensi, tetapi mengingat tingkat pengambilan air tanah tidak merata, maka hal tersebut mengakibatkan di tempat tertentu sudah terlihat adanya penurunan muka air tanah yang signifikan, sehingga terindikasi sudah masuk ke dalam zona rawan, kritis bahkan rusak seperti yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Timur dan Bogor Tengah.

C. ANCAMAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kota Bogor adalah kota rawan bencana karena kontur tanahnya yang labil, cuaca ekstrim dan ketidakpedulian warga terhadap lingkungannya. Berdasarkan hasil pemetaan daerah potensi bencana di Bogor, dari enam kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor, hampir separuh wilayahnya adalah rawan banjir dan longsor.

Di wilayah Kota Bogor sedikitnya terdapat 32 titik rawan bencana alam yang terdiri atas daerah rawan longsor dan banjir yang tersebar di 6 wilayah kecamatan se Kota Bogor. Untuk wilayah Bogor Tengah ada 3 titik rawan longsor, di Tanah sereal ada 6 titik rawan banjir, Bogor Barat 6 titik rawan longsor dan banjir, Bogor Selatan 12 titik rawan longsor, Bogor Timur 3 titik rawan banjir dan di wilayah Bogor Utara ada 2 titik rawan banjir.

Pada tahun 2014 tercatat lebih dari 40 peristiwa tanah longsor terjadi di berbagai lokasi di Kota Bogor, dalam skala kecil hingga besar. Di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat 39 titik rawan longsor pada 11 kelurahan, meliputi Kelurahan Cikaret, Empang, Bondongan, Batutulis, Pamoyanan, Cipaku, Genteng, Muarasari, Lawanggintung, Harjasari, Rancamaya, Bojongkerta, Mulyaharja, dan Pakuan. Kondisi ini terdapat pula di kecamatan lain seperti halnya pada beberapa wilayah di Kecamatan Bogor Tengah, salah satunya Kelurahan Gudang. Taksiran kerugian akibat bencana banjir dan longsor mencapai Rp 9,8 milyar.

Selain potensi bencana banjir dan longsor, terdapat potensi bencana lain yaitu pohon tumbang, angin ribut dan kebakaran (akibat petir dan arus pendek). Petir di Bogor termasuk yang terdahsyat di wilayah Asia Tenggara.

Iklim mikro kota Bogor dipengaruhi *climate change*. Berdasarkan informasi BMKG, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi kenaikan suhu rata-rata di Kota Bogor sebesar 10 C. Perlu antisipasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan yaitu kondisi kekeringan dan banjir. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, telah menyebabkan pemanasan global dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada semua sektor kehidupan termasuk karakteristik hidrologi Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Perubahan ini berdampak pada kerawanan terjadinya bencana baik banjir maupun longsor di kawasan DAS Ciliwung.

D. MOBILITAS PENDUDUK YANG AMAN, EFEKTIF, EFISIEN, DAN RAMAH LINGKUNGAN

Transportasi telah menjadi salah satu isu utama di Kota Bogor yang hampir 10 tahun ini terus menjadi perhatian. Masalah transportasi yang menjadi sorotan adalah titik-titik kemacetan yang ada di Kota Bogor, sarana prasarana lalu lintas yang tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, *underpass* (dari kampus IPB Baranangsiang menuju Kebun Raya Bogor) yang tidak digunakan, masih banyak jalan-jalan yang berlubang, dan tingginya angka *commuter* di Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Pengembangan sistem transportasi yang utama dilakukan di Kota Bogor sebaiknya adalah moda transportasi angkutan massal yang ramah lingkungan karena sesuai dengan citra Kota Bogor sebagai kota yang hijau dan kota dalam taman. Fasilitas mobilitas penduduk dibarengi upaya mengurangi titik-titik kemacetan, meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dan menyelesaikan penyebab-penyebab kemacetan seperti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

E. KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL

Ciri pembeda antara wilayah desa dan kota memang secara faktual dapat dilihat secara kasat mata yang menunjukkan bias pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Kota memberikan kesan yang lebih maju daripada desa.

Semua sisi kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup. Padahal di sisi lainnya, terdapat keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan, kemiskinan yang terkonsentrasi pada pemukiman kumuh (*slum area*).

Gambaran kaum miskin kota selain dari sisi rendahnya tingkat ekonomi, ialah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, pekerjaan tak tetap, lokasi pekerjaan berpindah-pindah dan seringkalimenjadi obyek kejaran aparat. Tak jarang, warga miskin di perkotaan terlibat tindakan kriminal yang meresahkan kehidupan sosial.

Kemiskinan juga ditunjukkan dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan. Masih terdapat 191,82 hektar kawasan kumuh, selain itu masih ada sebanyak 753 KK (0,31%) yang menggunakan air sungai sebagai MCK (Suseda, 2013) dan masih ada sebanyak 3.415KK (1,38%) tidak memiliki kloset (WC).

Kemiskinan juga dapat dilihat dari banyaknya penyandang masalah sosial, terutama yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya jumlah pekerja anak yang bekerja di jalanan. Diperkirakan ada lebih dari seribu anak jalanan yang beroperasi di perempatan, pertigaan, angkutan kota, pasar, dan terminal. Menurut Kepala Pelaksana Rehabilitasi Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2013), jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Bogor, selalu meningkat setiap menjelang Lebaran, bahkan hingga dua kali lipat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mencapai 88.900 jiwa (9,16%). Meskipun terus menurun dengan rata-rata 0,46 % per tahunnya, namun memiliki peringkat ke-4 tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat. Dari total penduduk Kota Bogor, 3,19% memiliki kategori sangat miskin, 6,28% miskin, dan 8,39 % hampir miskin. Dari total jumlah penduduk miskin, 29,45% tidak tamat SD, 55,18 % tamat SD/SMP dan 15,37 % tamat SMA keatas.

Dampak yang dimunculkan dari persoalan kemiskinan ini menjadi sangat kompleks sehingga persoalan ini menjadi isu strategis dengan tingkat kemendesakan yang tinggi untuk penyelesaiannya.

F. PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG TINGGI

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2010-2011 mencapai 1,80 %, angka ini sama dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun Provinsi Jawa Barat yakni 1,80%. Namun laju pertumbuhan penduduk Kota Bogormeningkat tajam pada tahun 2011 yaitu mencapai 4,06% untuk kemudian turun kembali pada tahun 2012 menjadi 3,87%. Pertumbuhan penduduk di Kota Bogor ini tidak hanya diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk alami (kelahiran), namun juga di sumbangkan oleh migrasi manusia.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut, merupakan tantangan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota, khususnya untuk SKPD yang menangani urusan kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi dukung dan daya tampung kawasan semata, melainkan berpengaruh terhadap seluruh variabel pelayanan sosial, karena keseluruhan pelayanan harus didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani.

G. WARISAN BUDAYA YANG BELUM MENGAJAR SEBAGAI BAGIAN DARI KARAKTER KOTA

Bogor memiliki sejarah yang panjang dengan identitas yang luar biasa melekat padanya. Keberadaan Ibukota Pajajaran, pusat pemerintahan pada masa kolonial, pusat penelitian, wisata, kota dalam taman, dan pemukiman paling nyaman, merupakan deretan julukan yang pernah melekat pada Kota Bogor. Berbagai peninggalan sejarah pun masih banyak yang tersisa di Kota Bogor yang harus dilestarikan keberadaannya.

Namun demikian, kenyataannya, keberadaan dari bangunan dan peninggalan bersejarah belum menjadi hal yang penting. Bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bogor belum diperhatikan sebagai sebuah aset yang bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur, melindungi dan melestarikan bangunan bersejarah. Kondisi ini dikuatkan dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang beralih fungsi menjadi bangunan komersial seperti hotel dan restoran.

Penghargaan terhadap warisan budaya tidak hanya berasal dari pemerintah sebagai pihak yang merencanakan dan membangun kota. Kepedulian juga harus datang dari warga masyarakat. Rendahnya keterkaitan antara warga dan kotanya akan bermuara pada belum dihargainya peninggalan kota.

Masyarakat Kota Bogor sebagian besar merupakan masyarakat *commuter* yang bekerja di luar Kota Bogor sehingga hanya menghabiskan waktunya di Kota Bogor ketika malam dan akhir pekan. Sehingga sebagian besar kurang memperdulikan nasib kotanya. Ketidakpedulian masyarakat juga ditunjukkan dengan kurangnya kepedulian warga terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah secara sembarangan, termasuk ke sungai.

H. PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN YANG BERKARAKTER DAN PENGUATAN CITRA KOTA BOGOR (CITY BRANDING)

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Bogor. Perkembangan pariwisata Kota Bogor akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya.

Objek wisata yang terdapat di Kota Bogor cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Bogor adalah dikembangkannya pariwisata berbasis *botanical garden* dan pengembangan wisata budaya yang selama ini belum berkembang di Kota Bogor.

Pengembangan pariwisata Kota Bogor ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Bogor. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam (tidak berbasis sumberdaya alam) sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Bogor.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Bogor perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata. Seperti yang diketahui bahwa masalah kemacetan merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

Karakter Kota Bogor sendiri adalah kota yang memiliki kenyamanan bagi masyarakatnya, memiliki julukan Kota Hujan, udara yang sejuk, memiliki kawasan *heritage* dengan keberadaan gedung peninggalan sejarah, seperti istana presiden sebagai peninggalan zaman kolonial, keberadaan Kebun Raya, bahkan memiliki sejarah pra kolonial sebagai pusat Kerajaan Pajajaran.

Degradasi lingkungan, hilangnya identitas kota yang merupakan dampak negatif yang sering ditimbulkan secara umum akibat perkembangan pariwisata perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut agar berkembangnya pariwisata di Kota Bogor tetap memberikan kenyamanan bagi penduduk asli yang tinggal di Kota Bogor, dan juga nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor.

Penguatan citra Kota Bogor (*city branding*) menjadi penting untuk meminimalisir salah satu dampak tersebut, sehingga karakteristik Kota Bogor tetap terjaga dan menjadi kekhasan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya, khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek dan kota/kabupaten di Jawa Barat.

I. PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF

Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri memiliki tren yang meningkat berdasarkan kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 25,10% dan pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 27,51% terhadap total PDRB. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan.

Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor

diantaranya adalah fesyen, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi untuk souvenir atau oleh-oleh.

Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor. Pengembangannya memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung.

J. PENATAAN, PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah hanya karena satu hal saja: bahwa aktivitas perdagangannya dilakukan di tempat yang bukan seharusnya. Akibatnya dari hal ini menjadi panjang: kemacetan, kekumuhan, premanisme.

Oleh karenanya, menyediakan ruang yang legal dan memang dikhususkan bagi PKL untuk berdagang adalah solusi utama. Ruang-ruang tersebut salah satunya adalah pasar tradisional.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Pasar tradisional biasanya ada proses tawar menawar, bangunan yang terdiri dari kios-kios atau gerai, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, jasa dan lain-lain.

Kondisi pasar tradisional di Kota Bogor secara umum hingga saat ini masih memprihatinkan, pasar tradisional terkesan semrawut dan kumuh. Hal tersebut dicirikan dengan sampah yang berserakan, becek, bau menyengat, dan sistem keamanan yang minim.

Kondisi fisik pasar tersebut mengakibatkan menurunnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang sekarang beberapa tahun belakangan ini berkembang pesat. Permasalahan seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, dan tidak terlepas dari menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL), menambah buruknya stigma pasar tradisional. Namun demikian keberadaan pasar tradisional di Kota Bogor memiliki nilai strategis dimana pasar tradisional merupakan pasar yang paling sering dikunjungi pembeli, terdapat banyak pedagang ritel tradisional, kemudahan akses bagi pemasok kecil termasuk petani.

Keberadaan pasar tradisional memberikan manfaat bagi pembeli, penjual, dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Subsektor perdagangan eceran (termasuk didalamnya pasar tradisional) di Kota Bogor juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB. Revitalisasi pasar tradisional menjadi hal baik dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern serta menjadi sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor.

Menurut Perusahaan Daerah (PD) Pasar, terdapat enam pasar yang akan direvitalisasi adalah Pasar Devris Jalan Raya Veteran, Pasar Gunung Batu, Pasar Cumpok, Pasar Taman Kencana, Pasar Bogor dan Pasar Yasmin. Revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasar tradisional dari segi fasilitas sarana-prasarana, dan manajemen pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar yang baik pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pasar,

tersalurnya produk-produk lokal, penyerapan sumberdaya setempat, terkelolanya dampak cemaran kegiatan pasar, serta tertatanya akses transportasi. Seperti yang diketahui bahwa aktivitas pasar cenderung mengakibatkan kemacetan.

Revitalisasi pasar tradisional berdampak strategis terhadap penanganan permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan PKL, dan kemacetan. Revitalisasi diharapkan mampu mengakomodir PKL yang selama ini belum memiliki kios, serta titik kemacetan yang ditimbulkan oleh aktivitas pasar. Revitalisasi pasar sebaiknya juga diintegrasikan dengan sistem transportasi sehingga dapat mengurai kemacetan yang menjadi permasalahan Kota Bogor berapa tahun belakang ini. Pada akhirnya, revitalisasi pasar menjadi salah satu jawaban akan penyediaan ruang khusus bagi PKL. Selain itu, penyediaan ruang dapat dilakukan melalui *zoning regulation*, ialah regulasi tentang penetapan zona-zona khusus PKL, biasanya terletak di sepanjang jalan.

K. PENGELOLAAN KOTA BERBASIS SMART CITY

Tantangan besar yang dihadapi Kota Bogor dalam lima tahun mendatang adalah juga bagaimana perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya dapat dioptimalisasikan untuk mendukung pengelolaan kota. Dalam waktu-waktu mendatang, akan menjadi hal yang jauh tertinggal dan inefisien ketika pengelolaan kota masih dijalankan dengan cara-cara yang konvensional atau cara-cara yang selama ini dipraktekkan selama sekian lama.

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai kemudahan dalam hidup kita, dan seyogyanya teknologi itu juga dimanfaatkan dalam pengelolaan kota. Sebenarnya ini bukan menjadi barang baru, karena telah lama kita mengenal istilah *e-government* (atau *e-gov*). Hanya saja, penerapannya yang memang masih menjumpai banyak kendala. Di tingkat negara, pada tahun 2012 Indonesia tidak termasuk daftar 50 negara teratas dalam hal kesiapan penerapan *e-Government* (sedangkan dua negara tetangga kita, yaitu Singapura dan Malaysia, masuk ke dalam daftar tersebut) (United Nations Department of Economic and Social Affairs 2012).

Dalam konteks antar kota di Indonesia, Kota Bogor sudah sangat seleyaknya mengimplementasikan sepenuhnya *e-government*. Keberadaan perguruan tinggi terkemuka di kota Bogor dan lembaga-lembaga penelitian dan ilmu pengetahuan sehingga mengentalkan Bogor juga sebagai kota pendidikan, ditambah lagi posisi strategisnya sebagai satelit ibukota negara, memperkuat konteks penerapan *e-gov* di Kota Bogor, bahkan jika memungkinkan menjadi kota yang terdepan dibanding yang lainnya.

Pada akhirnya, penerapan *e-gov* hanya menjadi salah satu pilar dari kota yang cerdas (*smart city*). Pendidikan yang berkualitas, proses pengambilan keputusan publik yang cerdas, dan masyarakat pembelajar (*learning society*), adalah pilar-pilar lainnya sehingga kota yang cerdas ini tidak hanya menyentuh pada aspek infrastruktur teknologi informasi saja, tetapi juga menyentuh soal sosial-budaya masyarakat.